

TAJUK RENCANA

Gaduh Gas Melon

WACANA kebijakan penjualan elpiji 3 kilogram hanya sampai di pangkalan yang dilontarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalia, beberapa hari lalu sempat membuat gaduh masyarakat. Bahkan Bahilil juga akan meniadakan pengecer elpiji 3 kilogram yang sering disebut gas melon. Dalam waktu bersamaan, terjadi kelangkaan gas melon di berbagai daerah.

Menurut Bahilil, wacananya itu bertujuan untuk mengendalikan penjualan elpiji 3 kilogram, sekaligus untuk mengendalikan harga gas melon yang mendapat subsidi dari pemerintah itu tidak di jual di atas harga eceran tertinggi (HET). Bahilil juga mengaku wacana tersebut dilatarbelakangi laporan yang diterima Kementerian ESDM terkait penyaluran elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran.

Wacana kebijakan dan kelangkaan elpiji 3 kilogram tersebut sonak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terlebih pengecer akan dilarang menjual gas melon. Kondisi tersebut direspons cepat oleh Presiden Prabowo Subiyanto dengan memutuskan bahwa pengecer tetap dapat menjual elpiji 3 kilogram dan statusnya menjadi sub-pangkalan. Dengan demikian diharapkan pengawasan terhadap penjualan gas melon lebih mudah dikontrol.

Namun perlu dicatat, bahwa status pengecer elpiji 3 kilogram menjadi sub-pangkalan memerlukan proses. Butuh waktu cukup lama, bahkan tidak menutup aturan dan prosesnya akan berbelit-belit. Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kebijakan penjualan elpiji 3 kilogram melalui sub-pangkalan juga memerlukan waktu untuk sosialisasi dan proses legalitas.

Sufmi Dasco menilai, jika penera-

pan penjualan elpiji harus melalui sub-pangkalan, maka masyarakat akan semakin sulit mendapatkan gas melon. Hal itu mengingat perubahan status pengecer menjadi sub-pangkalan juga butuh proses dan perlu sosialisasi.

'Blunder' Menteri ESDM Bahilil Lahadalia, terasa membuka fakta bahwa selama ini ada banyak penyimpangan terjadi dalam proses penjualan elpiji 3 kilogram. Masyarakat menjadi gamblang bahwa selama ini penjualan elpiji bersubsidi itu salah sasaran dan harganya di atas HET.

Kondisi ini juga direspons DIY, dengan memastikan stok gas melon yang cukup dan elpiji 3 kilogram benar-benar dinikmati masyarakat sasaran. Untuk itu, pangkalan diminta tetap menjual elpiji 3 kilogram sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Stok elpiji sudah jelas dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya di Jateng-DIY. Tinggal bagaimana pemerintah bergerak cepat memfasilitasi para pengecer menjadi sub-pangkalan. Yang pasti, seperti diungkapkan Sufmi Dasco, sejumlah kebijakan kementerian memang bisa berjalan tanpa persetujuan Presiden. Namun, Presiden dapat melakukan intervensi jika kebijakan itu berdampak luas ke masyarakat.

Khusus berkaitan dengan mekanisme penjualan pengecer elpiji 3 kilogram, seharusnya para pengecer dapat kembali berjualan dengan status sebagai subpangkalan. Untuk itu, pemerintah mestinya punya komitmen untuk memastikan distribusi elpiji 3 kilogram benar-benar tepat sasaran dan sesuai HET.

Kita tunggu saja, apakah akan ada gaduh gas melon lagi atukah 'blunder' Bahilil akan membuka kebijakan baru penjualan elpiji 3 kilogram? □ - f

Menanti Bersatunya PWI

SETIAP tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Peringatan ini untuk mengenang peran pers Indonesia dan semangat perjuangan para wartawan. HPN adalah milik para wartawan dan insan pers yang menjadi spirit untuk terus maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.

HPN juga sekaligus merayakan hari ulang tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dibentuk sejak 1946 silam. PWI merupakan organisasi profesi wartawan pertama yang lahir di negeri ini. Hanya saja pada HPN tahun 2025 ini, keberadaan PWI sedikit 'terkoyak', karena kini muncul dualisme kepengurusan dalam tubuh PWI Pusat.

Harus diakui, dualisme kepengurusan ini menjadikan PWI mengalami 'perpecahan'. Bahkan, konon puncak peringatan HPN pun digelar di dua lokasi, yakni Banjarmasin Kalimantan Selatan dan di Provinsi Riau. Kepengurusan ganda ini membuat PWI seperti terkotak-kotak. Ada pengurus provinsi yang ikut HPN Banjarmasin, ada pula beberapa yang memilih HPN di Riau.

Memang sangat ironis, organisasi wartawan tertua harus 'terbelah' seperti itu. Padahal, PWI sebenarnya memiliki tugas yang levelnya sudah tinggi, yakni untuk kepentingan bangsa dan negara.

Karena itu, bertepatan dengan HPN 9 Februari 2025, mestinya menjadi ajang rekonsiliasi kedua kepengurusan tersebut untuk bersatu kembali menjadi PWI Pusat yang utuh.

Baru-baru ini sempat ada kabar bakal diadakan Kongres PWI yang dipercepat. Bahkan, untuk keperluan tersebut sudah disepakati unsur penyelenggara melibatkan kedua kepengurusan yang berseteru. Mediasi juga sudah langsung dilakukan pihak yang netral. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda bakal berakhir.

Konflik di internal PWI Pusat itu berawal dari dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUNM untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan PWI. Namun, menurut Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun, pihaknya telah menun-

Mohammad Sobirin

taskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) PWI berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana tersebut.

Karena itu, ia menyebut setelah keputusan dan sanksi DK dilaksanakan, Ketua Umum dan Ketua DK bersepakat mengakhiri kemelut di PWI Pusat.

Tetapi, kenyataan yang terlihat hingga sekarang upaya perdamaian itu belum kunjung ada titik terang. Malahan masing-masing pihak mengadakan HPN sendiri-sendiri. Mereka juga telah membentuk kepanitiaan



KR-JOKO SANTOSO

dan mengagendakan beberapa kegiatan.

Banyak pihak berharap, seharusnya mendekati HPN 2025, kemelut di tubuh PWI Pusat sudah usai. Dengan demikian, perayaan puncak Hari Pers yang berlangsung 9 Februari bisa berlangsung di satu titik saja.

Akibat konflik yang berkepanjangan ini program PWI Pusat pun menjadi terhambat. Salah satunya, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang biasanya diselenggarakan organisasi kewartawanan tertua ini. Selama PWI Pusat masih dalam pusaran konflik, Dewan Pers sebagai lembaga yang memfasilitasi organisasi-organisasi pers untuk sementara menstop kegiatan UKW yang diadakan PWI.

Tak hanya itu, dampak perpecahan tersebut menjadikan ruangan atau Kantor PWI Pusat yang berada satu

kompleks dengan Dewan Pers, disegel, sehingga kini kedua kubu kepengurusan PWI yang berseteru harus berkantor di luar gedung PWI.

Karena itu, konflik internal yang menimpa PWI Pusat ini seharusnya cepat diakhiri. Rasanya, tak elok kalau harus berlarut-larut. Apalagi organisasi ini mempunyai peran utama mengawal kepentingan nasional.

Sebagai organisasi yang lahir di masa perjuangan dan sudah malang melintang dalam mengarungi beraneka zaman, PWI seharusnya mampu menjadi teladan bagi organisasi kewartawanan lainnya. Para pengurus yang kini saling berseberangan sampai terjadi dualisme kepemimpinan harus duduk bersama untuk bersatu kembali.

Momen HPN harus menjadi penanda mereka menyelesaikan konflik yang tidak produktif ini. Mereka tentu ingat pelaksanaan Kongres XXV PWI di Bandung September 2023 lalu yang berlangsung hangat dan penuh persaudaraan. Meski, saat itu masing-masing calon ketua umum seolah saling adu kuat, namun pada akhirnya setelah salah satu dari mereka terpilih, semua mendukung.

Kalaupun untuk mengakhiri perpecahan ini harus ditempuh melalui kongres yang dipercepat, mari lakukan dengan kepala dingin, penuh martabat dan tetap damai sebagaimana gambaran saat Kongres PWI di Bandung. Bersatulah PWI, 'Selamat

Merayakan HPN'. (*)-d
*)**Mohammad Sobirin**, Wartawan SKH 'Kedaulatan Rakyat' dan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI DIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH 'Kedaulatan Rakyat'. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi

(2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Pembatasan Media Sosial bagi Pelajar

Ridwan Mahendra

PEMBATASAN media sosial yang sedang digodok oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia bukan tanpa alasan. Langkah tersebut salah satunya yakni berdasar pada negara-negara yang menghadapi pengaruh buruk terhadap platform digital terhadap anak-anak.

Kita bisa menilik pada salah satu negara yang menerapkan pembatasan media sosial, yakni Australia. Di Negeri Kanguru (julukan Australia), anak-anak di bawah usia 16 tahun dibatasi dalam penggunaan media sosial. Regulasi di negara tersebut berani memberikan sanksi tegas bagi perusahaan teknologi yang melanggar dengan dikenakan denda mencapai AU\$50 juta (sekitar Rp 516 miliar).

Denda sangat besar yang diterapkan pemerintah Australia tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran konten yang merugikan, seperti misinformasi, ujaran kebencian, radikalisme daring, dan sebagainya.

Sebagai seorang pendidik, apabila pembatasan media sosial diterapkan di Indonesia, penulis sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Langkah tersebut sangat efektif apabila berka pada tata laka pelajar di era sekarang.

Selain itu, pembatasan penggunaan media sosial sangat relevan dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial yang kian meluas. Di sisi lain, pemerintah harus mengkaji lebih tentang pembatasan media sosial, sebab dengan media sosial pula banyak hal positif bagi anak-anak, misalnya hal positif tersebut yakni sebagai media pembelajaran oleh generasi.

Peran Guru dan Orangtua

Guru berperan dan bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan oleh peserta didiknya. Dalam konteks ini, guru dapat mengalihkan pembelajaran yang lebih menarik ketika pembatasan media sosial diberlakukan. Penulis mengimplikasikan hal-hal positif

ketika pembatasan media sosial diterapkan di Indonesia, antara lain; pertama, pemanfaatan pembelajaran luring yang kreatif. Dengan kekreatifan seorang pendidik, siswa akan memiliki daya imajinasi yang kompleks. Seperti pemanfaatan buku teks, lembar kerja, dan modul yang dapat diakses tanpa menggantungkan pada internet.

Kedua, pembelajaran dengan media alternatif. Dengan media alternatif yang dirancang oleh seorang pendidik, peserta didik tentu tidak bergantung pada platform-platform media (sebut: Google Classroom, Zoom) tanpa mengesampingkan kekreatifan siswa di dalam proses pembelajaran.

Ketiga, guru dapat meningkatkan kecakapan dalam interaksi. Dalam interaksi bukan sekadar di dalam kelas, guru dapat memanfaatkan media luar ruang dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh guru dapat merancang kegiatan luar kelas, seperti diskusi yang melibatkan siswa secara langsung.

Selain guru yang berperan penting dalam mengedukasi siswa tentang dampak-dampak yang terjadi akibat media sosial, peran orangtua sangatlah vital. Pertama, orangtua bertanggung jawab membantu anak dalam memahami dengan bijak mengenai dampak dari media sosial itu sendiri. Termasuk memahami etika dalam komunikasi di dunia siber.

Kedua, orangtua berperan dalam mengawasi aktivitas sang anak dalam penggunaan media sosial. Orangtua memastikan bahwa sang anak tidak terpapar konten negatif yang tidak pantasnya diakses oleh anak-anak.

Ketiga, orangtua terlibat atas kegiatan daring anak dengan tujuan komunikasi terbuka. Tujuan dari keterlibatan orangtua dalam kegiatan media sosial anak tak lain agar terciptanya hubungan yang lebih dekat dengan menghindari risiko yang kemungkinan terjadi, seperti *cyberbullying*.

Terakhir, dengan mendukung aturan pembatasan media sosial yang sedang digodok oleh pemangku kebijakan dengan mempertimbangkan dan mengkaji lebih matang, harapannya kasus seperti etika dan moral dengan menggunakan bahasa yang kurang sopan dapat diminimalisasi di ranah siber.

Penerapan pembatasan media sosial memang menuai pro dan kontra di masyarakat. Akan tetapi, apabila masyarakat kita sadar bahwa aturan pembatasan media sosial diterapkan tanpa mengesampingkan hal positif di dalamnya, peningkatan kemampuan psikologis anak dan peningkatan fokus pembelajaran akan mudah tercapai. Semoga. (*)-d

*)**Ridwan Mahendra**, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Wakil Kepala (Waka) bidang Kurikulum di SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta.

Pojok KR

Menteri Keuangan memberi sinyal gaji ke-13 dan THR ASN tetap akan cair.

- Cair-mencair.

Sufmi Dasco mengatakan masih ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo.

- Perlu ganti notasi?

Dampak tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, tiga desa masih terisolasi.

- Segera bebaskan isolasi.

Berabe